

PENDIRIAN LBH PERS YOGYAKARTA

Tahun demi tahun, eskalase kasus kekerasan terhadap pers tak kunjung berkurang, namun justru meningkat khususnya dari sisi kuantitas kekerasan. Bahkan, dari 56 kasus kekerasan sepanjang 2012, hanya tujuh kasus yang ditangani penyidik polisi maupun polisi militer. Sisanya, tak tertangani dan pelakunya tak tersentuh hukum!

Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBHPers) sepanjang tahun 2012, mencatat kondisi kebebasan pers di Indonesia sangat memprihatinkan. Adanya ancaman pidana penjara dan atau denda dalam pasal 18 UU No.40 tahun 1999, tentang Pers, tidak menyurutkan laju tingkat kekerasan terhadap jurnalis. Kasus-kasus kekerasan fisik dan non fisik terhadap jurnalis masih sering terjadi dan menjadi ancaman sangat serius terhadap keselamatan jurnalis. Kondisi ini, jika berkelanjutan dapat membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

Lebih jauh lagi, perlindungan bagi keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya sudah merupakan kewajiban dunia internasional. Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, telah menandatangani resolusi tanggal 27 September 2012, yang menyatakan pentingnya keselamatan jurnalis sebagai unsur fundamental pada kebebasan berekspresi. Di ranah dalam negeri, Kepolisian RI dan Dewan Pers yang telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang koordinasi penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers, pada tanggal 9 Februari 2012. Selain itu, LBH Pers juga mendukung pedoman Dewan Pers, dalam penanganan kekerasan terhadap jurnalis yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2012, dan didukung oleh beberapa organisasi profesi pers.

Sesuai dengan visi LBH Pers, yaitu terwujudnya masyarakat demokratis melalui upaya bantuan hukum dan perlindungan terhadap Kebebasan Pers. LBH Pers telah melakukan serangkaian pembelaan melalui bantuan hukum dan melakukan advokasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keberlangsungan kebebasan pers. Karena berbagai alasan tersebut, maka mulai hari ini, Jumat 4 Januari 2013 berbagai elemen masyarakat pemerhati jurnalis mendeklarasikan pembentukan LBH Pers Yogyakarta. Demikian susunan organisasi LBH Pers Yogyakarta:

1. Dewan Pengawas:

- Sahlan Said (Dewan Pengawas Indonesian Court Monitoring)
- Nur Ismanto (Ketua Ikatan Advokat Indonesia Yogyakarta)
- Heru Prasetyo (Ajiyo)
- M Faried Cahyono (Ajiyo)
- Ex officio Ketua Aji Yogyakarta

2. Badan Pelaksana

Direktur: Budi Kurniawan

Wakil Direktur: Samsudin Nurseha

Sekretaris: Hilarius Engmero

(Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia)

Wakil Sekretaris: Bambang Muryanto

Bendahara: Yamtini

3. Divisi

-Advokasi: Andi Awaluddin (Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia), Sukiratnasari, Sumiardi (Pusham UII)

-Kajian : Masjidi (Ajiyo), Oce Madril (Pukat UGM)

4. Anggota Kehormatan:

-Kamal Firdaus (advokat)

-Angger Jati (Ajiyo)

-Sri Wahyuni (Ajiyo)

-Najib Azka (UGM)

-Lukas Ispandriarno (Atmajaya)

-Masduki (Ajiyo)